

8/22
Sec. f

ABSTRAK

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD

Nuraini

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IIB Darmajaya
Jl. Z.A Pagar Alam No. 93, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35142
INDONESIA. Telp. (0721) 787214 Fax. (0721) 700261
Nura24183@gmail.com*

Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penegakan Peraturan, Kesesuaian Kompensasi, Perilaku Tidak Etis dan Budaya Organisasi terhadap variabel dependen yaitu kecurangan (*Fraud*) yang dilakukan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di kabupaten Tulang Bawang. Teknik untuk pengumpulan data sampel pada penelitian ini *convenience sampling*, teknik tersebut merupakan teknik dalam pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya, dengan menyebarkan 60 kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) versi 20. Hasil dalam penelitian ini (1) Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud. (2) Penegakan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud. (3) Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud. (4) Perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud. (5) Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud.

Kata kunci: Sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, komitmen organisasi, fraud.

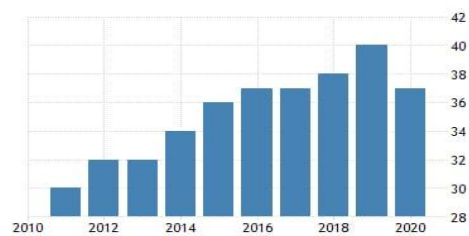
PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan dan memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada (Rahmawati dan Idjang, 2012 : 14). *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif dan tekanan yang tinggi.

Menurut Lanham et al, (1987) dalam Maula, K (2017) fraud dapat diartikan sebagai bentuk kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan rekening, penyelewengan, dan lai-lain. Menurut Wilopo (2006:21) menyatakan bahwa pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Contoh kasus korupsi yang terjadi yaitu melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Bawang tahun 2019. Nassarudin dan Guntur Abdul Nasser mereka

ditetapkan atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Fisik Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang tahun ajaran 2019 berupa pungutan DAK sebesar Rp. 3.670.239.750,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)," terangnya. (<https://kumparan.com>)

Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di 180 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-102 dan berada di skor 37/100 pada tahun 2020.



Sumber : indonesia corruption index (2010-2020)

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Di antaranya adalah sistem pengendalian internal pemerintah (Simbolon, 2020),

penegakan peraturan (Oktavia, 2020), kesesuaian kompensasi (Padhilah dan Dian, 2020), perilaku tidak etis (Yuliani, 2018), dan komitmen organisasi (Oktavia, 2020), (Indra dan Didi, 2018).

pengendalian internal adalah suatu proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam proses operasional organisasi atau perusahaan agar tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai dan untuk mengurangi kerugian atas kemungkinan terjadinya ancaman keamanan dalam informasi. Faktor selanjutnya yakni penegakan peraturan apabila dalam suatu instansi atau organisasi benar-benar menegakkan peraturan maka potensi fraud dapat lebih di minimalisir. Hal ini berarti semakin tinggi penegakan peraturan, maka dapat menekan terjadinya fraud.

Kesesuaian kompensasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan atau instansi. Pemberian kompensasi yang sesuai dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Faktor lainnya yaitu

perilaku tidak etis), perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Seseorang yang memiliki perilaku tidak etis yang kuat akan cenderung melakukan kecurangan. Semakin tinggi perilaku tidak etis yang ada dalam setiap individu terhadap organisasi maka akan meningkatkan kecurangan dan faktor yang terakhir budaya organisasi, budaya organisasi sangat penting dan merupakan kebiasaan dalam organisasi yang mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota organisasi, sehingga menghasilkan budaya yang produktif.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidaksamaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dan diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten tulang bawang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah Penegakan Peraturan mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah Kesesuaian Kompensasi mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah Perilaku Tidak Etis mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?
5. Apakah Budaya Organisasi mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?

LANDASAN TEORI

Fraud Triangle Theory

Penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle Theory* sebagai dasar teori utama. tiga elemen yang terdapat dalam teori segitiga kecurangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953) yaitu tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non keuangan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandang sebagai kebutuhan keuangan kepada orang lain, kesempatan adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan dan pembenaran merupakan bagian

fraud triangle yang paling sulit untuk diukur. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. “Pembenaran merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka membenarkan tindakan yang tidak jujur”(Tunggal , 2011).

Fraud Triangle Theory Tuannakota (2010) adalah model yang menjelaskan orang melakukan kecurangan (*fraud*) termasuk korupsi . Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1993).

Fraud

Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). Dalam pengertian ini diistilahkan bahwa fraud mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi.

Pengertian fraud itu sendiri merupakan penipuan yang disengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan atau kelompoknya, definisi fraud yang dikemukakan oleh Black Law Dictionary dalam Diaz Priantara (2013) yaitu suatu perbuatan sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak yang fatal dari tindakan itu sendiri.

SPIP

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*). Menurut Agung (2008:283) “Sistem pengendalian Internal pemerintah adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.” Menurut PP Nomor 8 tahun 2006 Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberi keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dalam menilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menggunakan satu indikator yaitu tingkat maturitas SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian internal sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan. Tingkat maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

penelitian ini menggunakan indikator pengendalian internal COSO yang tertuang dalam PP No 60 tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Penegakan Peraturan

Penegakan Peraturan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara Asshiddiqie (2008) dalam (Adinda, 2015).

Ditinjau dari pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penegakan peraturan itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan peraturan itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang ditetapkan, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan peraturan hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan hukum berjalan sebagaimana semestinya.

Kesesuaian Kompensasi

Menurut Veithzal (2006) dalam (Softian, 2017), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemberian

penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan dalam bisnis perusahaan. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik yang harus dihitung dan diberikan kepada pegawai. Pemberian kompensasi ini bertujuan sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima pegawai, yaitu: penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, produktivitas kerja pegawai, dll.

Perilaku Tidak Etis

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya Griffin & Ebert (2006) Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja. Tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam

lingkungan sosialnya. Buckley *et al.*, (1998) dalam Fauwzi (2012), menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan suatu yang sulit untuk dimengerti, jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya.

Budaya Organisasi

Menurut Sembiring (2012) Budaya organisasi pemerintahan (*government organizational culture*) merupakan sistem tata nilai bersama yang mewujudkan integrasi internal serta adaptasi eksternal dalam mendorong terwujudnya motivasi dan perilaku serta kinerja organisasi pemerintah terutama dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemungkinan besar suatu kecurangan terjadi ketika lingkungan pekerjaan integritasnya lemah, pengendaliannya tidak kuat, kehilangan akuntabilitas atau mendapatkan tekanan yang besar, maka tidak dapat dipungkiri seseorang akan melakukan ketidakjujuran.

Setiap organisasi bertanggungjawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (2018:441) dalam Zelmiyanti dan Anita (2015) adaah

budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Teori Arens diperkuat oleh Tunggal (2010:231) yang menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Bangunan Hipotesis

pengaruh spip terhadap terjadinya fraud

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi dan Puradiredja, 1998 dalam Fauwzi, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan Simbolon, 2020 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya fraud. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 :Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap terjadinya fraud

Pengaruh penegakan peraturan terhadap terjadinya fraud

Penegakan Peraturan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Apabila dalam suatu instansi atau organisasi benar-

benar menegakkan peraturan maka potensi fraud dapat lebih di minimalisir. Hal ini berarti semakin tinggi penegakan peraturan, maka dapat menekan terjadinya fraud. Hasil penelitian Oktavia, 2020 menemukan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap fraud. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Penegakan peraturan berpengaruh terhadap terjadinya fraud

Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap terjadinya fraud

Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang kesesuaian imbalan atau gaji dengan pekerjaan yang mereka lakukan (Hidayat, 2018). Semakin tinggi kompensasi yang diterima pegawai maka semakin rendah tingkat kecurangan. Kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan meningkatkan motivasi kerja dan mendorong karyawan tidak berbuat tindakan yang merugikan instansi. Sedangkan kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja karyawan akan memunculkan tindakan kecurangan yang dapat merugikan instansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Padhilah dan Dian, 2020 menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud. Berdasarkan

uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud

pengaruh perilaku tidak etis terhadap terjadinya fraud

Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. penelitian Yuliani, 2018 menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya fraud. Seseorang yang memiliki perilaku tidak etis yang kuat akan cenderung melakukan kecurangan. Semakin tinggi perilaku tidak etis yang ada dalam setiap individu terhadap organisasi maka akan meningkatkan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya fraud

Pengaruh budaya organisasi terhadap terjadinya fraud

Menurut Sembiring, (2012) Budaya organisasi pemerintahan (*government organizational culture*) merupakan sistem tata nilai bersama yang mewujudkan integrasi internal serta adaptasi eksternal dalam mendorong terwujudnya motivasi dan perilaku serta kinerja organisasi pemerintah

terutama dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap budaya organisasi dapat menekan terjadinya fraud. Penelitian Yuliani, 2018 menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap fraud. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 :Budaya organisasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” Sugiyono (2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten tulang bawang.

[https //web.tulangbawang.go.id](https://web.tulangbawang.go.id)

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, teknik tersebut merupakan teknik dalam pengambilan sampel

didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pegawai, manajemen keuangan, manajemen akuntansi

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah fraud sedangkan variabel independennya adalah sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, dan budaya organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek pada penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten tulang bawang. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan 60 kuesioner ke dinas yang terkait. Kemudian sampel yang telah dipilih, selanjutnya akan digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	60	2	5	4,52	,676
X2	60	2	5	4,40	,718
X3	60	1	5	4,33	,681
X4	60	2	5	4,45	,769
X5	60	3	5	4,42	,591
Y	60	1	5	4,33	,857
Valid N	60				

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel diatas dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Diketahui *sistem pengendalian internal pemerintah atau sipip* (X₁) dengan jumlah responden (N) sebanyak 60 responden dengan skor minimum adalah 2 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,52 dan standar deviasi sebesar 0,676.
2. Diketahui *penegakan peraturan* (X₂) dengan jumlah responden (N) sebanyak 60 responden dengan skor minimum adalah 2 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,40 dan standar deviasi sebesar 0,718.
3. Diketahui *kesesuaian kompensasi* (X₃) dengan jumlah responden (N) sebanyak 60 responden dengan skor minimum adalah 1 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,33 dan standar deviasi sebesar 0,681.
4. Diketahui *perilaku tidak etis* (X₄) dengan jumlah responden (N) sebanyak 60 responden dengan skor minimum adalah 2 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,45 dan standar deviasi sebesar 0,769.
5. Diketahui *budaya organisasi* (X₅) dengan jumlah responden (N) sebanyak 60 responden dengan skor minimum adalah 3 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,42 dan standar deviasi sebesar 0,591.
6. Diketahui *fraud/kecurangan* (Y) dengan jumlah responden (N) sebanyak 60 responden dengan skor minimum adalah 1 dan skor maksimum adalah 5 dengan total rata-rata jawaban 4,33 dan standar deviasi sebesar 0,857.

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0.452	Realibel
X2	0.209	Realibel
X3	0.458	Realibel
X4	0.321	Realibel
X5	0.493	Realibel
Y	0.552	Realibel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 yang berarti telah reliabel, sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstand ardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,202177
	Absolute	,106
Most Extreme Differences	Positive	,106
	Negative	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,822
Asymp. Sig. (2-tailed)		,509

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolomogrov-smirnov* yang dipaparkan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa dependen K-Z sebesar 0,822 dengan tingkat signifikan sebesar 0,509. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa angka signifikan (sig) pada uji *kolomogrov-smirnov* diperoleh $0,509 > 0,05$ artinya data terdistribusi secara normal, sehingga model pada penelitian ini layak untuk dipakai dalam penelitian.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	,921	1,086
X2	,639	1,564
X3	,903	1,107
X4	,659	1,518
X5	,865	1,156

a. Dependent Variable: fraud

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari kelima variabel independen lebih dari >0.10 dan VIF (variance inflation faktor) kurang dari <10 yang berarti tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen sehingga layak untuk digunakan.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Nilai Signifikan
X1	0,561
X2	0,354
X3	0,403
X4	0,883
X5	0,520
Y	0,110

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, budaya organisasi dan fraud memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan.

Hasil Uji Regresi Linier

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,236	5,315		1,361	,179
X1	,122	,138	,119	,886	,379
X2	,121	,102	,192	1,191	,239
X3	,064	,107	,081	,594	,555
X4	-,285	,140	-,323	-2,034	,047
X5	-,092	,135	-,095	-,682	,498

a. Dependent Variable: fraud

Berdasarkan tabel diatas uji regresi linier berganda di atas maka model persamaan regresi yang di gunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,236 + 0,122X_1 - 0,121X_2 + 0,064 X_3 - 0,285X_4 - 0,092X_5 + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas, terlihat nilai konstanta sebesar 7,236. Koefisien variabel spip sebesar 0,122, Koefisien penegakan peraturan -0,121, Koefisien kesesuaian kompensasi sebesar 0,064, Koefisien perilaku tidak etis sebesar -

0,285 dan Koefisien budaya organisasi sebesar -0,092.

Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,319 ^a	,102	,019	1,257

a. Predictors: (Constant), budaya organisasi, kesesuaian kompensasi, sip, perilaku tidak etis, penegakan peraturan

Dari output diatas, didapatkan nilai adjusted R square (koefisien determinasi) sebesar 0,019 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) sebesar 19 % sedangkan 81 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dilua

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,236	5,315		1,361	,179
1 X1	,122	,138	,119	,886	,379
X2	,121	,102	,192	1,191	,239
X3	,064	,107	,081	,594	,555
X4	-,285	,140	-,323	2,034	,047
X5	-,092	,135	-,095	-,682	,498

a. Dependent Variable: fraud

- Hipotesis pertama (H_{a1}) dalam penelitian ini adalah *sistem pengendalian internal* pemerintah sebagai variabel X_1 . Hasil pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,379 > 0,05$. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a1} ditolak dan menerima H_{o1} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan *sistem pengendalian internal* pemerintah terhadap *fraud*.

2. Hipotesis kedua (H_{a2}) dalam penelitian ini adalah *penegakan peraturan* sebagai variabel X_2 . Hasil pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,239 > 0,05$. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a2} ditolak dan menerima H_{o2} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan *penegakan peraturan* terhadap *fraud*.

3. Hipotesis ketiga (H_{a3}) dalam penelitian ini adalah *kesesuaian kompensasi* sebagai variabel X_3 . Hasil pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,555 > 0,05$. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a3} ditolak dan menerima H_{o3} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan *kesesuaian kompensasi* terhadap *fraud*.

4. Hipotesis keempat (H_{a4}) dalam penelitian ini adalah *perilaku tidak etis* sebagai variabel X_4 . Hasil pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,047 < 0,05$. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a4} diterima dan menolak H_{o4} yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan *perilaku tidak etis* terhadap *fraud*.

5. Hipotesis kelima (H_{a5}) dalam penelitian ini adalah *budaya organisasi* sebagai variabel X_5 . Hasil pada tabel diatas

menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,498 > 0,05$. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a5} ditolak dan menerima H_{o7} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan *budaya organisasi* terhadap *fraud*

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	9,665	5	1,933	1,224	,311 ^b
Residual	85,269	54	1,579		
Total	94,933	59			

a. Dependent Variable: fraud

b. Predictors: (Constant), budaya organisasi, kesesuaian kompensasi, spip, perilaku tidak etis, penegakan peraturan

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai (sig) sebesar $0,311 > 0,05$ dengan nilai F sebesar 0,311. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel spip, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*).

KESIMPULAN

Dari data primer yang diolah dari melakukan penyebaran kuesioner di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten tulang bawang pada tahun 2021 maka selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variable reliabel dan valid. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten tulang bawang dengan jumlah sampel 60 responden dapat ditarik kesimpulan:

1. H_1 ditolak, artinya sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud.
2. H_2 ditolak, artinya penegakan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud.
3. H_3 ditolak, artinya kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud.
4. H_4 diterima, artinya perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud.
5. H_5 ditolak, artinya komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih merata sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih mencerminkan realita.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independent lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sehingga dapat meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan kecurangan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden. Tidak hanya di bagian keuangan saja melainkan bisa ke bagian yang lain, misalnya di bagian logistik atau bagian lainnya. Karena bentuk kecurangan tidak bisa di lakukan pada satu bagian saja, tetapi akan merambah ke bagian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Yanita Maya, Sukardi Ikhsan. 2015. "Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten". *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1-9.

- Arens, Alvin A. 2008. "Auditing dan Jasa Assurance Pendektan Terintegrasi Jilid 1". *Jurnal akuntansi*. Jakarta : Erlangga
- COSO, C. o. (2004). *Enterprise Risk Management - Integrated Framework*.
Committee of Sponsoring Organization.
- Fatmawati, Sri. 2015. "Pengaruh whislabloing system dan efektivitas audit internal terhadap pendeteksian dan pencegahan kecurangan (fraud)". *Skripsi (SI) thesis*, Fakultas Ekonomi UNPAS.
- Fauwzi, M. Glifandi, 2011. "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". *Skripsi Ekonomi*: Universitas Diponegoro.
- Fauwzi, M. Glifandi, 2012. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi Ekonomi*: Universitas Diponegoro.
- Geh, Lampung. 2021. "Jaksa tulang bawang lampung tetapkan 2 tersangka dugaan korupsi DAK Disdik",
<https://kumparan.com/lampunggeh/jaksa-tulang-bawang-lampung-tetapkan-2-tersangka-dugaan-korupsi-dak-disdik-1vBjoDTBJLP>, diakses pada 16 february 2021 pukul 18.58.
- Griffin, R, W & bert, R, J. 2006. *Bisnis*. Jakarta : Erlangga
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. (edisi ketiga)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hidayat, Rahmat. (2018). "Kontribusi nilai hedonis dan utilitarian dalam

- menciptakan kepuasan pelanggan”. *Surat sains* 24(4), 2288-2291.
- Huda, mohammad chairul. 2012. “Peran peraturan dalam meningkatkan kedisiplinan” skripsi. Malang : UIN Malang
- <https://image.app.goo.gl/S5K392sqCvWQy1bA>
- <https://tulangkawangkb.go.id>. Di akses tahun 2021.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Kusuma, Indra Cahya dan Didi. 2018. “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan (fraud) persepsi pegawai pemerintah daerah Kota Bogor”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 15, no. 1, pp. 1-20, 2018.
- Kumaat. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Lister, L. A “Practical Approach to Fraud Risk: Comprehensive Risk Assessment Can Enable Auditors to Focus Anti – Fraud Efforts on Areas Where Their Organization is Most Vulnerable”. *Internal Auditors Vol. 64 No. 6, 2007*.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maula, K. (2017). “Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Pendorong Tindak Kecurangan terhadap Kecendrungan Aparatur Pemerintah Melakukan Fraud (Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Banyumas)”, 2(1), 273–287.
- Mustikasari, D. P. (2013).” Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang”. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 250-258.
- Najahningrum, A. F. (2013). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY”. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259-267.

- Norbarani, L. (2012). "Pendeteksian Kecurangan laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No.99". *Skripsi*, 1-59.
- Noor. Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media Group, NCSS,1992, Curriculum Standards for Social Studies.
- Oktavia, Della, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Di Pemerintah Kabupaten Klaten". *Jurnal Akuntansi* , vol. 4, no. 1, 2020.
- Pravitasari, S. (2016). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Padhilah, Salma Fitri Nur dan Dian Imanina Burhany. 2020. "Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten bandung barat)". *Jurnal Akuntansi* , vol. 4, no. 1, 2020.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Rahmawati, Ardiana Peni dan, Idjang.2012. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang". *Undergraduate thesis*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UNDIP.
- Ramadhan, Ardito. 2021. " indeks persepsi korupsi indonesia pada tahun 2020 turun jadi 37, peringkat 102 di dunia", [https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi](https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-) korupsi-indonesia-pada-

- tahun-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-didunia, diakses pada 28 Januari 2021 pukul 14.12.
- Softian, Pria Agung. (2017). "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Motivasi Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Kab Lima Puluh Kota)". Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sembiring, M. 2012. *Budaya & Kinerja: Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media.
- Soekanto, S. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, E. 2013. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Primadamedia Group
- Sugiyono. (2014). "*Metode Penelitian bisnis*". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). "*Metode Penelitian bisnis*". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta.
- Simbolon, Elsaidah. 2020. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu". *Akuntansi [710]*.
- Tunggal, Amin Wijaja. 2010. *Dasar-dasar audit internal pedoman untuk auditor baru*. Jakarta: harvarindo
- Thoyibatun, Siti, 2012. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan : Universitas Negeri Malang. ISSN 1411-0393 Vol.16. No. 2*.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A. 2011 "*Teori dan Kasus Internal Auditing*". Jakarta: Harvarindo.

Wilopo. 2006. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. Paper dipresentasikan pada acara *Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang. STIE Perbanas Surabaya

Yuliani, Silvia. 2018. “Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Instansi Pemerintahan Kab. Pasaman Barat)”. *Jurnal Akuntansi* , vol. 6, no. 3, 2018.

Zelmiyanti, Riri & Lili, Anita, 2015. “Pengaruh budaya organisasi dan peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening”. *Jurnal akuntansi keuangan dan bisnis*. Vol. 8. Hal.67-76.